

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012), Tiaras dan Wijaya (2012), Andrean (2018) yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak, berdasarkan hasil yang dikemukakan oleh peneliti tersebut, peneliti tersebut menyimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena hal ini mengindikasikan bahwa apabila perusahaan melakukan manajemen laba yang tinggi maka perusahaan identik melakukan agresivitas pajak. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Kartikasari, Munthe, Fatahurrazak (2016), Cahyani (2016) hasil penelitian ini menunjukkan perusahaan yang melakukan manajemen laba tetap membayar pajak dengan semestinya.

Untuk penelitian Atari (2014) dan Zahirah (2016) yang memiliki tujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan konstitusional terhadap agresivitas pajak mendapatkan hasil yang sama yaitu semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi maka akan semakin besar tekanan yang diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mahulae (2016). Tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Hidayah (2015) dan Pratiwi (2018).

Fadli (2014) dan Novitasari (2015) melakukan penelitian yang sama yaitu menguji dua variabel yaitu variabel manajemen laba dan kepemilikan institusional mendapatkan hasil yang sama pada variabel manajemen laba yaitu ada pengaruh variabel manajemen laba terhadap agresivitas pajak, tetapi untuk penelitian Fadli (2014) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan untuk penelitian Novitasari (2015) variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada atau tidak adanya kepemilikan saham institusi di dalam suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi agresivitas pajak.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teory Agency**

Menurut scott (2003:305) :

Teori agensi merupakan teori yang membahas hubungan antara *principal* dan *agent*. Pemilik perusahaan atau pemilik saham dalam perusahaan merupakan *principal* dan manajer atau karyawan merupakan *agent* dan mendefinisikan teori agensi sebagai berikut:

*“Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motive a rational agent to act on behalf of a principal when the agent interests would otherwise conflict with those of principal”*

Kim, Nofsinger dan Kohr (2010) dalam Hidayanti (2013) berpendapat bahwa pada umumnya terdapat pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajemen

perusahaan. Pemisahan ini diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan bisnis perusahaan. Adanya pemisahan tersebut tentu akan menimbulkan resiko, yaitu adanya konflik antara pemilik perusahaan dengan manajemen dan hal ini juga disebut dengan *Agency Conflict*.

*Agency Conflict* dapat berupa adanya tindakan individualism antara kedua pihak, untuk saling menguntungkan dirinya sendiri dan menomorduakan kepentingan perusahaan. Pemilik perusahaan sebagai *principal* akan lebih fokus pada peningkatan nilai saham perusahaan sedangkan manajemen akan lebih fokus pada kepentingan mereka sendiri yang cenderung akan mengambil kebijakan secara sepihak yang dapat merugikan perusahaan (Hidayanti, 2013).

Konflik antara perusahaan dan manajemen juga dapat berdampak kepada permasalahan yang melibatkan pemerintah, salah satunya adalah penghindaran pajak. Manajemen yang cenderung ingin meningkatkan keuntungan perusahaan atau laba bersihnya akan menggunakan banyak cara, salah satunya agresivitas pajak dan hal ini terjadi karena pemisahan antara kepemilikan dan manajemen. Hal ini belum tentu disetujui perusahaan, karena pemilik cenderung tidak ingin perusahaan mendapat akibat yang akan merugikan perusahaan jika agresivitas pajak dilakukan.

## **2. Pajak**

Pengertian pajak yang menurut buku Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

### 3. Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait. Manajemen laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba (*income smoothing*), *taking a bath*, *income maximization* dan *income minimization* (Scott, 2000) dalam (winda dkk, 2016). Pihak manajemen memiliki wewenang untuk memilih opsi dan aturan-aturan yang diterapkan dalam perlakuan akuntansi. Melalui wewenang tersebut memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam mengelola laba perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya, yaitu memperoleh insentif dari hasil kinerjanya yang diukur dari besarnya laba yang dicapai.

Praktik manajemen laba memiliki kaitan yang erat dengan motivasi-motivasi pihak manajemen dalam memenuhi sasaran yang ingin dicapai maupun penggunaan *judgement* dalam penyusunan laporan keuangan. Tingkat praktik manajemen laba dalam perusahaan mencerminkan seberapa baik kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat manajemen laba akan meningkatkan asimetri informasi yang terjadi antara *principal* dan *agen*.

Penelitian Rahman dan Hutagol (2008) dalam Setyamurti (2015) menyebutkan praktik manajemen laba dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

**a. Manajemen Laba Riil**

Merupakan praktik manajemen laba yang dilakukan dengan tujuan pencapaian target laba dan menghindari terjadinya kerugian dalam aktivitas operasional perusahaan yang dapat dicapai dengan cara:

1. Manipulasi penjualan, bertujuan meningkatkan penjualan pada periode tertentu sehingga memberikan kesan bahwa pencapaian target penjualan dan laba terpenuhi. Pada umumnya, praktik manipulasi penjualan ini dilakukan dengan memberikan diskon penjualan yang lebih besar maupun dengan memberikan kemudahan kredit penjualan. Praktik ini dapat memberikan dampak pada penurunan aliran kas perusahaan.
2. Pengurangan beban-beban diskresionari atau meminimalkan beban-beban yang tidak secara langsung berkaitan dengan produksi barang/jasa. Hal ini dimaksudkan untuk mencantumkan beban dengan jumlah yang minimal sehingga didapatkan laba yang cenderung lebih besar.
3. Produksi yang berlebihan. Manajemen berupaya meningkatkan penjualan dengan harga yang rendah. Untuk menekan harga jual tersebut manajemen memproduksi barang dalam jumlah yang berlebihan dan diharapkan dapat meningkatkan penjualan serta laba perusahaan.

## **b. Manajemen Laba Akrua**

Merupakan praktik manajemen laba yang dilakukan melalui proses akrual dimana laporan keuangan dihasilkan. Angka-angka dalam laporan keuangan mengandung komponen akrual, baik diskresioner maupun non-diskresioner.

Pendekatan lain yang digunakan untuk merekayasa dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Cara ini merupakan cara manajer untuk memengaruhi *judgement* terhadap estimasi akuntansi seperti: estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tetap tidak berwujud, estimasi biaya garansi dan lain-lain.
2. Mengubah metode akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan. Hal ini sering disebut keputusan operasional, misalnya: rekayasa periode biaya atau pendapatan dengan mempercepat atau menunda pengeluaran untuk biaya penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran biaya promosi sampai periode akuntansi berikutnya mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai.

#### **4. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga keberadaanya memiliki arti penting bagi pemantauan manajemen. Dengan adanya monitoring tersebut maka pemegang saham akan semakin terjamin kemakmurannya, pengaruh kepemilikan institusional yang berperan sebagai agen pengawas ditekan oleh investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Permanasari, 2010). Menurut Faisal (2004), kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham.

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan.

Dalam penelitian Ayu dan Annisa (2012) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemilik, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Keberadaan investor institusional juga mengindikasikan adanya tekanan dari pihak investor kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan penghindaran pajak dalam rangka memperoleh laba yang maksimal untuk investor institusional (Dewi dan Jati, 2014).

Menurut Fadhillah (2014) besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak agresif.

Penelitian dari Pranata, Puspa, dan Herawati (2013) menyatakan bahwa besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan. Khurana dan Moser (2009) juga menyatakan bahwa semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder institutional* akan



meningkatkan kebijakan pajak agresif, akan tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder institutional* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Agresif pajak mengarah kepada penghematan pajak yang menyebabkan perusahaan potensial dikenakan sanksi oleh IRS (*Internal Revenue Service*) terkait biaya pelaksanaan dan biaya agensi. (Chen, et, al, 2008, dalam Ayu dan Annisa, 2012). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan, dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat, dan optimis (Khurana dan Moser, 2009).

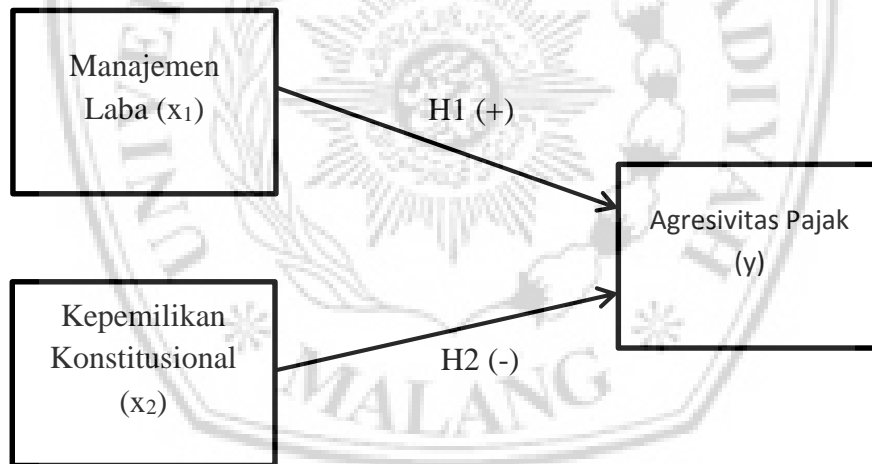
Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan guna mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pemegang saham eksternal mempunyai insentif untuk memonitor dan mempengaruhi manajemen secara wajar untuk melindungi investasi mereka dalam perusahaan. Pemegang saham eksternal mengurangi perilaku manajer yang oportunis, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi langsung antara manajemen dan pemegang saham. (Wahidawati, 2002).

## **5. Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak merupakan kegiatan yang lebih spesifik, yaitu mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan beban pajak perusahaan. Perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih

rendah. Tujuan menurunkan beban pajak perusahaan yang akan dibayar menjadi salah satu hal yang harus dipahami dan melibatkan beberapa etika masyarakat atau adanya pertimbangan dari pemangku kepentingan perusahaan. Namun, disisi lain pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat, dan hukum (Yoehana, 2013).

### C. Kerangka Pemikiran



#### **D. Perumusan Hipotesis**

##### **1. Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak**

Manajemen yang cenderung ingin meningkatkan keuntungan perusahaan atau laba bersihnya akan menggunakan banyak cara, salah satunya agresivitas pajak dan hal ini terjadi karena pemisahan antara kepemilikan dan manajemen. Manajemen laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba (*income smoothing*), *taking a bath*, *income maximization* dan *income minimization* (Scott, 2000). Scott (2000) menyatakan bahwa salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Perusahaan akan melakukan *income decreasing* untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Semakin agresif melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil. Umumnya laba yang tinggi akan diiringi beban pajak yang tinggi, tetapi bagi perusahaan pajak adalah salah satu hal yang mengurangi keuntungan perusahaan sehingga perusahaan melakukan agresivitas pajak sehingga laba yang tinggi dalam perusahaan dimanipulasi seolah laba tersebut rendah dan beban pajak juga menjadi rendah karena kembali lagi pada sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2010), Tiaras dan Wijaya (2012) dan Andrean (2018) yang memiliki tujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak, berdasarkan hasil yang dikemukakan oleh peneliti tersebut, peneliti tersebut menyimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena hal ini

mengindikasikan bahwa apabila perusahaan melakukan manajemen laba yang tinggi maka perusahaan identik melakukan agresivitas pajak yang tinggi pula.

Hipotesis sebagai berikut :

H1 : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

### **1. Kepemilikan Institusional Agresivitas Pajak**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga keberadaanya memiliki arti penting bagi pemantauan manajemen. Dengan adanya monitoring tersebut maka pemegang saham akan semakin terjamin kemakmurannya, pengaruh kepemilikan institusional yang berperan sebagai agen pengawas ditekan oleh investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Permanasari, 2010). Menurut Faisal (2004), kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat

bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham seperti agresivitas pajak yang dilakukan manajemen.

Untuk penelitian Atari (2014) dan Zahirah (2016) yang memiliki tujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan konstitusional terhadap agresivitas pajak mendapatkan hasil yang sama yaitu semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi maka akan semakin besar tekanan yang diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan.

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.